

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

Wiwini Widaningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269558&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertifikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Negara mengkomodifikasi perkembangan ini melalui kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadis dengan tujuan utamanya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pada kasus sengketa tanah mengenai pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Cikampek Selatan atas nama Tuan Yanto Sutisna, yang menjadi pokok permasalahan adalah perlindungan hukum bagi dirinya sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah yang telah ia peroleh dengan itikad baik, lalu mengenai tepat atau tidaknya putusan Pengadilan, baik pada tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat. Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan seputarnya, khususnya mengenai pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Cikampek Selatan yang kemudian dianalisis guna memberikan saran atau jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang telah

memperolehnya dengan itikad baik, lalu putusan pengadilan yang dirasa kurang tepat karena tidak memperhatikan lewatnya jangka waktu dengan adanya lembaga rechtsverwerking. Oleh karena itu, dirasa perlu sikap ketelitian oleh calon pembeli tanah yang belum maupun sudah bersertipikat, serta sikap independen dan profesional dari lembaga peradilan umum di Indonesia guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

<hr>

ABSTRACT

In this globalized and modern era, land holds a central role in man's life and is the utmost essential and crucial issue. Exhibited by the many civil and criminal cases brought among the court, such as legacy disputes, obligations containing land guarantee, government administration issues regarding the publication of land certificate, etc. The government so as accommodates this so called development by its duty to perform land registration in the systematic or sporadic way in order to assure law certainty and law protection for the land owner as its main purpose. The annulment of land certificate dispute brought up in this thesis refers to the certificate number 17/Cikampek Region owned by Mr. Yanto Sutisna, having shown a series of problems such as law protection for Mr. Yanto Sutisna, having being a good-willed land owner. Plus the precision of the court's verdict which decided to execute the accuser's claim. In order to attain the answers to such problems mentioned above, an analytic-descriptive library research is necessary to describe the process of land registration, to offer suggestions and seek solutions towards the series of problems, particularly the annulment of land certificate number 17/Cikampek Region owned by Mr. Yanto Sutisna. Facts brought upon this research consists of the characteristic of land certificate not having enough law enforcement, sought by the possibility of accusation by another party towards the land owner of illegal ownership. Secondly, no law protection is found upon the land owner carrying good will. Last but not least, the lack of precision towards the court's verdict brought upon without considering the rechtsverwerking institution time limit. As of that, it is quite necessary for a land buyer to first examine the land certificate before purchasing. Also the

necessaty of independency and professionalism of the
courthouse in Indonesia to realize justice in the society.;